



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SIDOARJO



KOMISI C DESAK PROYEK PAGAR PENDOPO SELESAI ON TIME



H. CHOIRUL HIDAYAT
Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo

Sidoarjo - Pojok Kiri, Proyek Rehab Pagar pendopo Delta Wibawa tahun anggaran 2024 yang menempel di Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan nominal Rp 829.579.000 rupiah dari pagu 1 miliar ini dan start pekerjaan dari Oktober - Desember akhir 2024 dalam masa hari kerja tiga bulan (3 bulan) yang bersumber dari dana APBD asli Sidoarjo akan menjadi wajah pendopo Delta Wibawa Sidoarjo estetik dan menjadi daya tarik tersendiri khususnya ketika ada tamu dalam dan luar negeri agar terlihat estetik. Ucapan ketua komisi C DPRD Sidoarjo, H. Choirul Hidayat politikus gaeK PDIP yang terpilih kembali duduk dikursi legislatif yang sebelumnya pernah menjabat Kades Lebo ini saat dikonfirmasi wartawan via whatsapp, Minggu 10/11/24. Menurutnya proyek rehab pagar pendopo dengan style pagar yang estetik gaya Mojopahit ini harus selesai ontime/ tepat waktu pada 31 Desember 2024 dan malam pergantian tahun 2024 ke 2025 pendopo Delta Wibawa sudah tampak estetik, Katanya.

Sedangkan H. Anang Siswandoko ST politikus Gerindra yang juga terpilih kembali duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ini, ia juga memberikan warning pada kontraktor pelaksana proyek pagar pendopo ini untuk mengerjakan secara maksimal agar pekerjaan bisa selesai tepat waktu/ ontime, ia menekankan tidak asal mengejar selesai tepat waktu pada kontraktor namun ia juga menekankan pekerjaan proyek ini bisa

berkualitas, Tandias H. Anang Siswandoko pada wartawan saat dikonfirmasi wartawan via whatsapp, Minggu 10/11/24. H. Anang yang sebelum jadi anggota DPRD Sidoarjo ia pernah jadi seorang kontraktor ia tahu betul bagaimana menjadi kontraktor yang berkualitas agar kedepannya bisa menang memperoleh proyek lagi, Katanya.

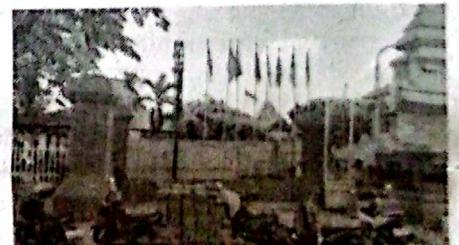
Ia yakin kontraktor gaeK asli putra daerah H. Dedy yang mengerjakan proyek pagar pendopo Delta Wibawa ini bisa menyelesaikan sebelum deadline, karena kontraktor Dedy ini spesifikasi nya di bidang bangunan gedung, Katanya. Sedang Direktur PT Indokon Raya H. Dedy kontraktor ternama rekanan Pemkab Sidoarjo saat dikonfirmasi wartawan Minggu, 10/11/24 terkait proyek rehab pagar pendopo kabupaten Sidoarjo, ia akan kerjakan proyek itu dengan maksimal secara kualitas dan kuantitas dan akan kami selesaikan pada waktu yang tepat ontime bahkan kami usahakan sebelum deadline akan finishing. Menurutnya ia berdomisili hidup di Magersari dan pendopo kabupaten Sidoarjo juga wilayah kelurahan Magersari olehkarenanya proyek itu kami anggap bangun rumah saya sendiri maka kami jaga benar kualitas dan kuantitas proyek ini, Tukas H. Dedy pada wartawan. Penghobi bola club Inter Milan ini menegaskan kami sebagai kontraktor putra daerah dan mengemban ketua Gapensi Sidoarjo dengan pembangunan pagar pendopo dengan style Mojopahit ini akan menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat Sidoarjo untuk mencintai kabupaten Sidoarjo khususnya bagi tamu dalam maupun luar negeri yang berkunjung ke pendopo kabupaten Sidoarjo, Katanya.

Sedangkan politikus gaeK Srikandi PKB dari unsur muslimat, Hj. Ainun Jariyah anggota DPRD Sidoarjo, ia berkomitmen pada kepentingan warga untuk menjadi perhatian khusus terutama dibidang yang ia bidangi di komisi C tentang proyek pembangunan pagar pendopo termasuk gapurnya akan semakin estetik sehingga menyedot daya tarik tersendiri bagi tamu domestik maupun mancanegara khususnya bagi masyarakat Sidoarjo sendiri. Katanya saat dikonfirmasi wartawan, Minggu 10/11/24. Sedangkan Dr. Feny Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo saat dikonfirmasi wartawan terkait proyek rehab pagar pendopo kabupaten



Dra. Hj. AINUN JARIYAH
Sekretaris Komisi C DPRD Sidoarjo

Sidoarjo dengan anggaran APBD Sidoarjo tahun 2024 sebesar hampir 1 miliar, ia katakan tujuan dari rehab pagar pendopo sendiri disamping sudah usang dan doyong hampir roboh juga bertujuan akan merubah image wajah pendopo Delta Wibawa menjadi estetik dan ia yakin kontraktor bonafide asli Sidoarjo mampu menyelesaikan tepat waktu serta menjaga kualitas dan kuantitas nya. Kata perempuan yang jadi sekda pertama kali dari unsur gender perempuan ini (Khol/ADV)



Proyek Pagar Pendopo - Sidoarjo

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SIDOARJO



KOMISI D RESPEK PADA IMUNISASI PVC DAN RC AGAR GENERASI EMAS SEHAT



MOCH. DHAMRONI CHUDLORI, M.Si.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo

Sidoarjo - Pojok Kiri, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, H.Dhamroni Khudori sangat respek pada generasi penerus bangsa khususnya yang masih balita sebagai generasi emas di tahun mendatang yang dicanangkan secara nasional pada tahun 2045 sebagai tahun generasi emas bangsa Indonesia. Gus Dam sapaan akrab politikus PKB yang mendapatkan perolehan suara yang signifikan menjulang tinggi sehingga ia duduk kembali di kursi legislatif Sidoarjo periode 2024 - 2029, ia peduli dengan imunisasi PCV (Pneumokokus Konyugasi) serta RV (Rotavirus) yang dimotori oleh penggerak PKK dengan leading sektor dinas kesehatan agar generasi emas yang akan datang benar-benar terjaga jasmani serta rohani nya sehingga mereka bisa sejajar dengan generasi bangsa maju lainnya di kanca dunia internasional. Ujarnya saat dikonfirmasi wartawan via whatsapp, Minggu, 10/11/24.

Dia pun berharap program imunisasi PCV serta RV ini bisa masif di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Sidoarjo melalui Puskesmas agar angka Pneumonia serta diare bisa ditekan hingga angka nol persen, Harapnya. Sedangkan legislator PAN, H Bangun Winarso berpendapat generasi penerus bangsa harus lebih hebat dari generasi sekarang, oleh karena itu ia sangat respek dengan program imunisasi PCV dan RV yang bertujuan untuk menyehatkan generasi penerus bangsa yang akan datang dan apalagi nanti pada tahun 2045 dicanangkan

generasi emas bangsa Indonesia, Tukas politisi PAN yang berparas ganteng dan berwibawa ini saat dikonfirmasi wartawan via whatsapp, Minggu, 10/11/24.

Tak pelak H. Usman M. Kes legislator 4 kali periode mantan ketua DPRD Sidoarjo periode sebelumnya, ia rela berkorban demi generasi penerus bangsa dalam hal imunisasi PCV serta RV dilakukan di rumah nya, mari ibu ibu PKK dan dinas kesehatan dari unsur Puskesmas silahkan rumah saya ditempati tempat imunisasi PCV serta RV, Ucapan pria yang berbackground master kesehatan ini pada wartawan saat dikonfirmasi via whatsapp, Minggu, 10/11/24. Rumah megah di areal Puri Indah Suko Sidoarjo itu memang tepat ditempati imunisasi PCV serta RV mengingat halaman cukup luas nan asri ucapan Kades Suko, H Subari saat dikonfirmasi wartawan terkait rumah anggota DPRD Sidoarjo, H Usman M. Kes yang bersedia ditempati tempat imunisasi PCV serta RV. Sedangkan Plt Kadis Kesehatan dr. Laksmie Herawati Yuwantina memasifkan program imunisasi PCV dan RV pada lintas OPD dinas terkait agar tujuan menekan angka zero Pneumonia dan diare pada tahun 2024 dan berikutnya bisa tercapai, Katanya saat sosialisasi program ini di Fave Hotel Sidoarjo.



H. USMAN M. Kes

Sedangkan saat wartawan Pojok Kiri investigasi di kantor Dinkes, Senin 11/11/24 untuk mengorek berapa anggaran untuk imunisasi PCV serta RV dalam satu tahun anggaran 2024 justru tak mendapat jawaban di suruh buat secara tertulis, Pintanya staf bagian reprints, padahal wartawan dikejar deadline. Sedangkan melihat di laman Kemenkes sasaran imunisasi pada Balita usia 0 - 11 bulan dan 11 sampai dengan usia 24 bulan serta imunisasi diawali pada bulan November 2024 ini. (Khol/ADV)



99 Persen Pemilih Pemula Sudah Jalani Perekaman KTP

Wamendagri Meninjau Layanan di Dispendukcapil

SIDOARJO - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya melakukan kunjungan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sidoarjo kemarin (12/11).

Dalam kunjungan itu, dia didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Fenny Apri-dawati, serta Kepala Dispendukcapil Redy Kusuma. Bima memantau langsung pelayanan administrasi kependudukan di kantor tersebut.

Dalam kesempatan itu, Bima Arya menekankan pentingnya percepatan perekaman KTP bagi pemilih pemula, terutama

menjelang Pilkada Serentak yang tinggal dua pekan lagi. "Perekaman data nasional telah dimulai, dan kami menargetkan agar semua pemilih pemula sudah terdata untuk bisa berpartisipasi dalam Pilkada Serentak," jelasnya.

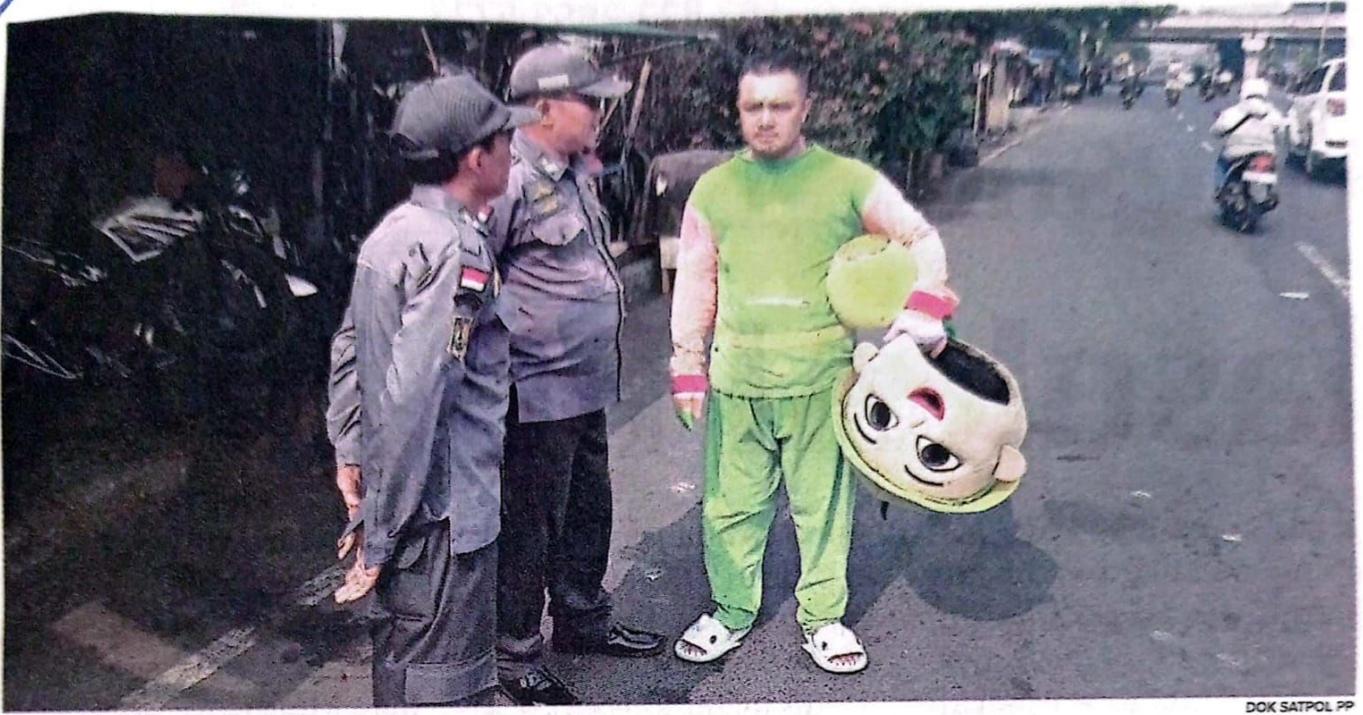
Bima juga memberikan apresiasi layanan yang sudah diberikan dispendukcapil. Salah satunya sudah menyatukan berbagai layanan kependudukan dalam satu tempat, yakni Mal Pelayanan Publik (MPP).

Selain itu, Bima juga memuji program inovasi jemput bola yang secara rutin dilakukan. "Ini luar biasa," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Dispendukcapil Sidoarjo Redy Kusuma mengungkapkan bahwa pihaknya telah bekerja untuk mengejar target perekaman KTP pemilih pemula. "Per akhir Oktober lalu, kami sudah mencatatkan 99,52 persen pemilih pemula. Kami turun langsung ke sekolah-sekolah setiap minggu," kata Redy. (uzi/ris)



Jawa Pos



DOK SATPOL PP

Satpol PP Tegur Pengamen hingga Badut

TIM Satpol PP Sidoarjo menysisir jalur-jalur protokol di wilayah Sidoarjo kemarin (12/11). Mereka menertibkan aktivitas para pengamen hingga badut jalanan. Salah satunya seperti yang berlangsung di jalur protokol di kawasan Medaeng. Kegiatan kali ini bersifat preventif. (uzi/ris)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sae Dapat Dukungan dari Masyarakat Pencinta Sepak Bola

SIDOARJO - Dukungan terhadap calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) Achmad Amir Aslichin-Edy Widodo (Sae) terus bertambah. Kali ini datang dari elemen yang menamakan dirinya Masyarakat Pencinta Sepak Bola Sidoarjo (MPSS).

Mas lin, sapaan akrab Achmad Amir Aslichin, menyambut baik dukungan tersebut. Sebab, dia mengaku memiliki perhatian khusus terhadap perkembangan sepak bola dan klub lokal di Sidoarjo. "Sepak bola tidak bisa lepas dari perhatian pemerintah daerah," katanya.

Menurutnya, alokasi anggaran dari pemerintah daerah memainkan peran krusial dalam me-



KEMBANGKAN OLAHRAGA: Achmad Amir Aslichin bersama para warga yang tergabung dalam Masyarakat Pencinta Sepak Bola Sidoarjo.

ngembangkan sepak bola di Sidoarjo. "Kami akan siapkan nanti. Mulai dari pertumbuhan dan pengembangan olahraga

sepak bola di Sidoarjo, serta memberikan peluang bagi pemain lokal untuk berkembang," tegas Mas lin. (uzi/ris)

Jawa Pos

Kunjungi Pasar Wadungasri, Subandi Janjikan Revitalisasi

SIDOARJO - Calon bupati (cabup) Subandi melanjutkan safari ke pasar-pasar tradisional. Kemarin (12/11) giliran Pasar Wadungasri, Waru, yang dikunjunginya.

Seperti biasa, dia menemui para pedagang untuk mendengarkan aspirasi. Cukup banyak keluhan yang disampaikan mereka, mulai infrastruktur pasar sampai harga bahan pokok.

Dalam kesempatan itu, Subandi menyampaikan komitmen untuk merevitalisasi pasar tradisional di wilayah Sidoarjo. "Saya melihat langsung kondisi pasar tradisional. Sudah waktunya direvitalisasi karena kondisinya kurang layak dan stan tidak tertata dengan baik. Nanti kami perbaiki sehingga nyaman untuk berjualan



RUTIN: Subandi berdialog sekaligus menyerap aspirasi para pedagang saat berkunjung ke Pasar Wadungasri kemarin (12/11).

dan berbelanja. Nanti kami buat pasar yang lebih modern," ujarnya.

Karena itu pula, selama kampanye ini, dia rutin berkeliling pasar-pasar tradisional di

Sidoarjo. "Kami ingin menciptakan ruang usaha yang lebih layak untuk mendukung perekonomian masyarakat lokal," katanya. (uzi/c19/ris)

Jawa Pos

PAVINGISASI DESA PLUMBUNGAN BANYAK MANFAAT BAGI MASYARAKAT

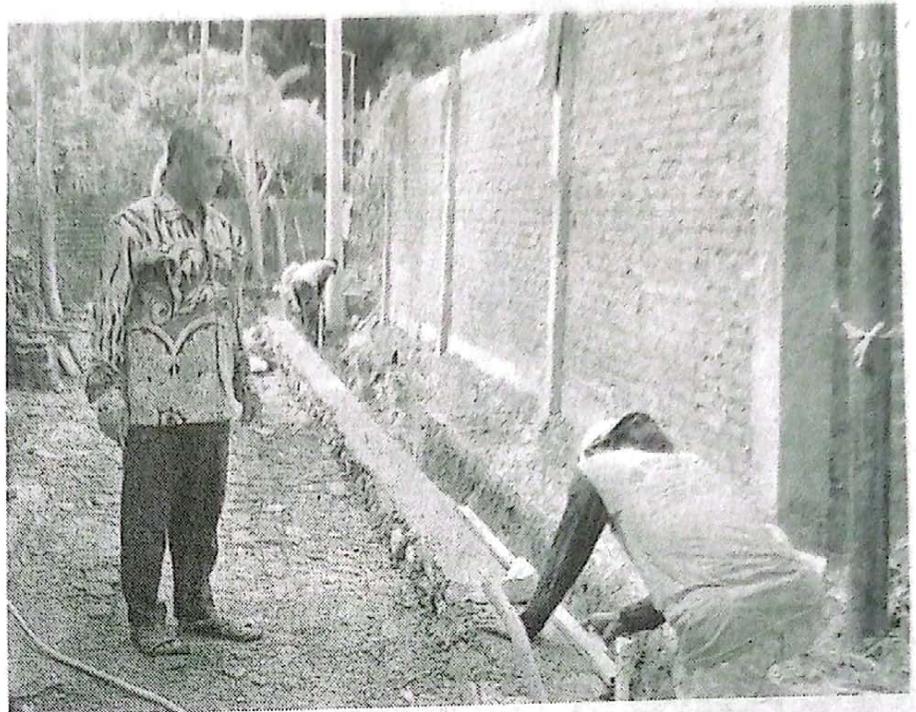
Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Program pavingisasi di Desa Plumbungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, terbukti memberikan beragam manfaat bagi masyarakat. Bukan hanya soal perubahan fisik di lokasi pekerjaan. Tetapi juga manfaat pekerjaan hingga partisipasi masyarakat. Tak heran banyak masyarakat bersyukur hadirnya program tersebut.

“Sangat bermanfaat sekali mas, karena seperti gang saya sendiri kemarin masih tanah dan kalau hujan jelas becek. Alhamdulillah adanya program paving ini gang di tempat saya menjadi bersih,” kata Heri warga RW/8 kepada awak media Pojok Kiri Selasa (12/11/2024).

Apalagi, program tersebut dikerjakan secara swakelola melalui kelompok masyarakat setemoat. Artinya, ada kolaborasi antara pemerintahan Desa dengan masyarakat. Pemdes memberikan anggarannya melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk masyarakat setempat yang mengerjakan. Tak heran, masyarakat turut merasakan uang pemerintah melalui pekerjaan pavingisasi.

“Bukan hanya itu saja, dengan sistem swakelola ini warga juga bisa mengetahui secara gamblang detail



Pavingisasi Pamukiman & Plengsengan Samping Makam

antara warga setempat juga baik,” jelasnya.

Hal itu, berbeda dengan sistem pembangunan melalui rekanan. Pembangunan dengan pihak ketiga memang tidak melibatkan masyarakat secara langsung. Bahkan, masyarakat seringkali tidak tahu menahu terkait pembangunan yang berjalan. Terkadang kita masyarakat tidak tahu gambarnya pekerjaan nanti seperti apa tanpa

plengsengan dan Pavingisasi jalan Makam RT/06.RW/02. dengan luas 3x43 m dengan menelan anggaran sebesar Rp.30 juta. Pavingisasi di RT/08.RW/03.volume 3x45 m menghabiskan anggaran Rp.25 juta kampung dikerjakan.

Yusuf juga menyampaikannya, “Dana Desa untuk tahun 2024 sudah terserap semuanya dengan program pembangunan infrastruktur.

pekerjaannya. Karena sebelum pelaksanaan pekerjaan ada Musdes dan dihadiri oleh semua RT di lingkungan masing-masing Mereka tahu RAB (Rencana Anggaran Biaya) dari usulannya mereka dan juga lebih mudah pengawasannya. Koordinasi

pemberitahuan ke warga langsung dikerjakan.

Afif Khusni Kepala Desa Plumbungan, Melalui Yusuf Kepala Dusun (Kasun) menyampaikan, untuk Dana Desa TA 2024 ada pembangunan Fisik yang masih dalam proses pengerjaan seperti, pembuatan

Untuk kegiatan anggaran Dana Desa dalam pelaksanaannya melibatkan TPK sesuai regulasi. Azas transparansi kegunaannya bisa dipertanggungjawabkan. Semuanya sesuai dengan harapan masyarakat," klaim Yusuf. (Lie/Khol)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT

SAMBUNGAN

Pemda Usul PPDB Zonasi Disempurnakan

Sambungan dari hal 1

Salah satunya soal usulan mayoritas pemerintah daerah (pemda) untuk penyempurnaan program penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi.

Asmadi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Singkawang, Kalimantan Barat, mengatakan, zonasi itu seperti dua sisi mata uang. Satu sisi merupakan kebijakan yang baik, tapi sisi lain sangat perlu dibenahi bersama. Pembenahan tersebut berkaitan dengan sebaran guru maupun sarana-prasarana (sarpras) yang tidak merata. Singkawang saja saat ini masih kekurangan sekitar 500 guru ASN.

"Bagaimana kita ingin melaksanakan pendidikan yang bermutu, sementara kita masih kekurangan guru. Itu Singkawang, apalagi kawan-kawan kabupaten yang

lain," ungkap Asmadi kemarin (12/11). Karena itu, dua persoalan tersebut diminta untuk segera dibenahi seutuhnya. Dengan begitu, zonasi bisa berjalan baik sesuai tujuan awal.

Direktur SMA Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Winner Jihad Akbar mengamini. Pemda merekomendasikan adanya penyempurnaan mekanisme PPDB yang lebih adil dan berkeadilan. Kebijakan PPDB saat ini dinilai masih relevan untuk diteruskan dengan beberapa penyempurnaan pada penerapan jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua.

Selain itu, muncul rekomendasi agar PPDB melibatkan sekolah swasta dengan bantuan pembiayaan APBD. Kebijakan tersebut sejatinya memegang peran penting dalam memastikan akses pendidikan yang me-

rata dan berkualitas. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai keterbatasan daya tampung sekolah, masih adanya favoritisme sekolah, hingga distribusi guru yang belum sesuai kebutuhan di berbagai daerah.

"Pemda menyampaikan bahwa kebijakan PPDB berbasis zonasi sudah sejalan dengan upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan, tetapi perlu upaya lanjutan," ungkapnya.

Terkait kebijakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru, pemda meminta ada jaminan penghargaan dan perlindungan. Misalnya, jaminan keamanan bekerja, khususnya pada daerah rawan; hak untuk cuti alasan penting, izin tugas belajar, hingga insentif untuk guru mengajar pada daerah 3T. Selain itu, pemda berharap ada pe-

nyelesaian bagi permasalahan guru-guru yang lulus ASN PPPK, tetapi tidak sesuai linieritasnya dan adanya mekanisme para guru agar dapat diangkat ataupun ditugaskan di sekolah swasta.

Terkait seluruh aspirasi tersebut, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat menyampaikan apresiasi kepada para kepala dinas pendidikan daerah dan perwakilan pemda atas kontribusi mereka dalam upaya perbaikan pendidikan di Indonesia. Rekomendasi tersebut akan dikaji lebih lanjut.

Ditemui dalam kesempatan berbeda, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, pihaknya sedang bekerja untuk melakukan telaah terhadap masukan-masukan pemda terkait dengan zonasi tersebut. Belum ada keputusan

apakah kebijakan itu dilanjutkan atau tidak. "Kalau misalnya dilanjutkan, apakah kita lanjutkan sebagai mana sekarang atau kita lakukan beberapa perubahan dan sebagainya, nanti kita sampaikan lebih lanjut," ungkapnya. Keputusan itu paling lambat ditentukan

menjelang tahun ajaran baru pada Juli mendatang.

Di sisi lain, Mu'ti secara khusus bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit kemarin. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas pendidikan untuk masyarakat di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Se-

lain faktor geografis, isu keamanan menjadi salah satu tantangan. Atas kondisi itu, keduanya sepakat untuk menghidupkan kembali program polisi mengajar atau relawan mengajar yang sebagian unsurnya berasal dari kepolisian. (mia/c7/oni)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT

Pemda Usul PPDB Zonasi Disempurnakan

- Harus Hitung Sebaran Guru, Sarpras, dan Libatkan Sekolah Swasta
- Temui Kapolri, Mendikdasmen Bahas Polisi Mengajar di Daerah 3T

JAKARTA - Rapat koordinasi (rakor) evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah ditutup dengan sejumlah rangkuman =
Baca Pemda... Hal 11

Diterapkan mulai 2017 melalui Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017.

Sistem zonasi mengharuskan sekolah menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah.

Lolos atau tidaknya siswa ditentukan domisili sesuai alamat pada KK yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum PPDB dilaksanakan.



Pada aturan awal, kuota zonasi 90 persen dari jumlah total siswa yang diterima. Sisanya diisi calon siswa jalur prestasi dan perpindahan domisili.

Besaran kuota berubah di era Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kuota zonasi diperkecil menjadi 50 persen. Kemudian, jalur afirmasi untuk pemegang kartu Indonesia pintar tetap 15 persen, prestasi 5-15 persen, dan perpindahan domisili orang tua tetap 5 persen.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber
GRAFIS: MELIAMBANG/JAWA POS

Jawa Pos

SAMBUNGAN

Pemda Usul PPDB Zonasi Disempurnakan

Sambungan dari hal 1

Salah satunya soal usulan mayoritas pemerintah daerah (pemda) untuk penyempurnaan program penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi.

Asmadi, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Singkawang, Kalimantan Barat, mengatakan, zonasi itu seperti dua sisi mata uang. Satu sisi merupakan kebijakan yang baik, tapi sisi lain sangat perlu dibenahi bersama. Pembenahan tersebut berkaitan dengan sebaran guru maupun sarana-prasarana (sarpras) yang tidak merata. Singkawang saja saat ini masih kekurangan sekitar 500 guru ASN.

"Bagaimana kita ingin melaksanakan pendidikan yang bermutu, sementara kita masih kekurangan guru. Itu Singkawang, apalagi kawan-kawan kabupaten yang

lain," ungkap Asmadi kemarin (12/11). Karena itu, dua persoalan tersebut diminta untuk segera dibenahi seutuhnya. Dengan begitu, zonasi bisa berjalan baik sesuai tujuan awal.

Direktur SMA Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Winner Jihad Akbar mengamini. Pemda merekomendasikan adanya penyempurnaan mekanisme PPDB yang lebih adil dan berkeadilan. Kebijakan PPDB saat ini dinilai masih relevan untuk diteruskan dengan beberapa penyempurnaan pada penerapan jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua. Selain itu, muncul rekomendasi agar PPDB melibatkan sekolah swasta dengan bantuan pembiayaan APBD. Kebijakan tersebut sejatinya memegang peran penting dalam memastikan akses pendidikan yang me-

rata dan berkualitas. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai keterbatasan daya tampung sekolah, masih adanya favoritisme sekolah, hingga distribusi guru yang belum sesuai kebutuhan di berbagai daerah.

"Pemda menyampaikan bahwa kebijakan PPDB berbasis zonasi sudah sejalan dengan upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan, tetapi perlu upaya lanjutan," ungkapnya.

Terkait kebijakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru, pemda meminta ada jaminan penghargaan dan perlindungan. Misalnya, jaminan keamanan bekerja, khususnya pada daerah rawan; hak untuk cuti alasan penting, izin tugas belajar, hingga insentif untuk guru mengajar pada daerah 3T. Selain itu, pemda berharap ada pe-

nyelesaian bagi permasalahan guru-guru yang lulus ASN PPPK, tetapi tidak sesuai linieritasnya dan adanya mekanisme para guru agar dapat diangkat ataupun ditugaskan di sekolah swasta.

Terkait seluruh aspirasi tersebut, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat menyampaikan apresiasi kepada para kepala dinas pendidikan daerah dan perwakilan pemda atas kontribusi mereka dalam upaya perbaikan pendidikan di Indonesia. Rekomendasi tersebut akan dikaji lebih lanjut.

Ditemui dalam kesempatan berbeda, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, pihaknya sedang bekerja untuk melakukan telaah terhadap masukan-masukan pemda terkait dengan zonasi tersebut. Belum ada keputusan

apakah kebijakan itu dilanjutkan atau tidak. "Kalau misalnya dilanjutkan, apakah kita lanjutkan sebagaimana sekarang atau kita lakukan beberapa perubahan dan sebagainya, nanti kita sampaikan lebih lanjut," ungkapnya. Keputusan itu paling lambat ditentukan

menjelang tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Di sisi lain, Mu'ti secara khusus bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit kemarin. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas pendidikan untuk masyarakat di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Se-

lain faktor geografis, isu keamanan menjadi salah satu tantangan. Atas kondisi itu, keduanya sepakat untuk menghidupkan kembali program polisi mengajar atau relawan mengajar yang sebagian unsurnya berasal dari kepolisian. (mia/c7/oni)

Jawa Pos

Pemuda Gelam Korban Penipuan Dijadikan Admin Judol

Dijanjiikan Kerja CS

SIDOARJO - Yudha Wahyu Palupi Bagus Tejowono (36) warga Desa Gelam Kecamatan Candi akhirnya dapat pulang kerumah dengan selamat. Pria berusia 36 tahun tersebut menjadi korban penipuan pekerjaan di negara Kamboja. Imiting-iming pekerjaan sebagai customer service sebuah perusahaan di Kamboja tidak didapatkannya.

Alih-alih ia disana ternyata dipekerjakan sebagai admin judi online. Perusahaan tersebut juga diduga Yudha sebagai perusahaan scamming. Karena itulah ia menolak. Akhirnya Yudha dipersulit perusahaannya untuk kembali ke Indonesia. Videonya pun sempat viral saat dirinya meminta pertolongan untuk dipulangkan.

Kemarin sore, Pjs. Bupati Sidoarjo Muhammad Isa Ansori melihat kondisi Yudha dirumahnya, Senin, (11/11/24). Kedatangannya



Pjs. Bupati Sidoarjo Muhammad Isa Ansori, Kadisnaker dan Kepala Desa Gelam bersama Yudha Wahyu korban penipuan tenaga kerja

bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo Ainun Amalia memastikan kondisi Yudha baik-baik saja. Ia juga menyerahkan bantuan dari Baznas Sidoarjo serta bingkisan dari Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo. Muhammad Isa Ansori

mengatakan kasus seperti Yudha dapat menjadi pelajaran bersama untuk tidak tergiur dengan janji agen penyalur tenaga kerja keluar negeri abal-abal. Ia meminta masyarakat Sidoarjo selektif dalam memilih agen penyalur tenaga

kerja keluar negeri. Agen tersebut harus agen resmi yang diakui pemerintah. Dengan begitu dapat berangkat melalui prosedur yang benar. Bukan melalui Medsos yang seperti terjadi kepada Yudha.

"Untuk anak-anak muda Sidoarjo agar lebih berhati-hati dengan ajakan-ajakan (pekerjaan) yang tidak sesuai prosedur, kalau mau berangkat keluar negeri harus melalui prosedur yang benar, kalau butuh informasi bisa datang ke Disnaker Sidoarjo," pesannya.

Muhammad Isa Ansori juga menyampaikan bahwa sejak video Yudha viral di Medsos, upaya Pemkab Sidoarjo untuk membantu kepulangan Yudha telah dilakukan. Waktu itu ia perintahkan Disnaker Sidoarjo untuk bersurat ke KBRI di Kamboja agar dapat membantu kepulangan Yudha. Bahkan ia juga sempat perintahkan Kadisnaker Sidoarjo untuk menjemput Yudha ke Kamboja," kata Isa Ansori Selasa

(12/11/24)

"Kemarin bu Kadisnaker sudah berkitim surat (ke KBRI Kamboja) supaya bisa membantu kepulangan mas Yudha ini, kita sudah melangkah kesana, bahkan bu Kadisnaker sempat juga saya suruh ke Kamboja," ujarnya.

Yudha bersyukur dapat kembali pulang kerumah bertemu anak istrinya. Ia katakan awal mula terjebak di Kamboja saat mencari informasi lowongan pekerjaan di sebuah akun Facebook. Akun tersebut menawarkan pekerjaan sebagai customer service. Ia pun tertarik dan menghubungi akun tersebut. Akun tersebut kemudian mengarahkan untuk berkomunikasi lewat telegram. Dari situlah akhirnya ia diterima untuk bekerja di Kamboja. Namun saat disana ia dipekerjakan sebagai admin judi online. Tidak seperti kesepakatan sebelumnya sebagai customer service. Seketika itu ia menolaknya. Akibatnya intimidasi didapatnya. ● Loe



Wamendagri Bima Arya Apresiasi Layanan Jemput Bola Disdukcapil



Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya melakan sidak ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sidoarjo, Selasa (12/11). Hal tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kualitas layanan kependudukan yang diberikan kepada masyarakat.

M Saiful Rohman, Wartawan Radar Sidoarjo

MENDADAK: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya saat sidak ke Disdukcapil Sidoarjo.

KOTA-Dalam kunjungannya, Bima didampingi oleh Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati dan Kepala Dinas Disdukcapil Sidoarjo, Reddy Kusuma.

Bima mengapresiasi terhadap pelayanan yang diberikan. Menurutnya, apa yang diberikan sudah sangat baik, cepat dan mudah diakses masyarakat.

● Ke Halaman 10



INFO MEDIA PERS

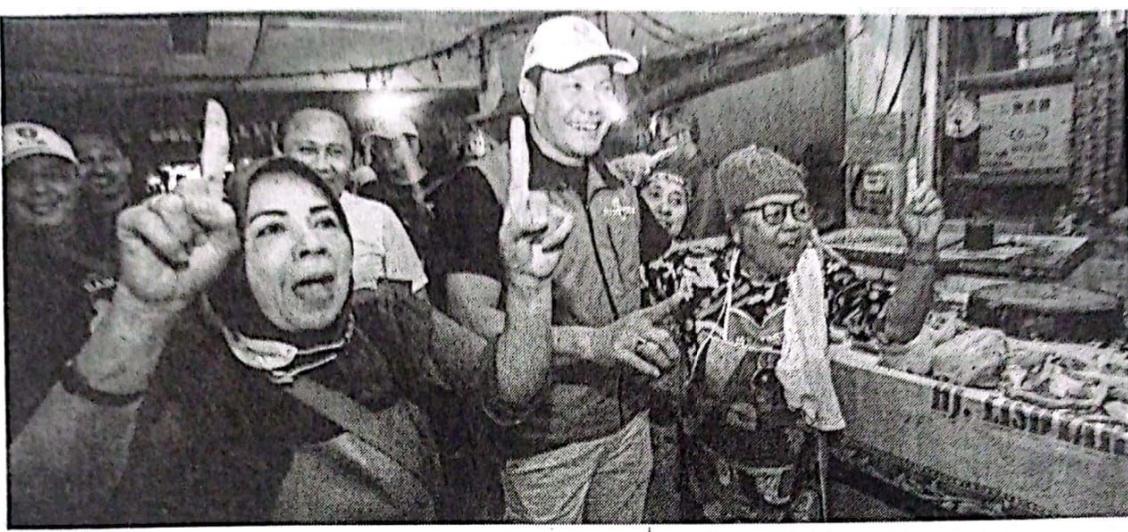
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Wamendagri Bima Arya...

"Saya melihat pelayanannya seperti apa, kalau saya lihat Sidoarjo sudah sangat luar biasa karena mempunyai Mal Pelayanan Publik (MPP), pelayanan dipusatkan disana, jadi sudah sangat maju," ucapnya saat ditemui selepas sidak.

Bima terkesan dengan MPP Sidoarjo, yang mengintegrasikan berbagai layanan kependudukan dalam satu tempat. Hal ini membuat pelayanan menjadi lebih efisien dan mudah dijangkau oleh warga.





MENYAPA:
Cabup
Subandi
mengunjungi
Pasar
Wadungasri
Waru.

Cabup Subandi Akan Revitalisasi Pasar Tradisional

KOTA-Cabup Sidoarjo Subandi mengunjungi Pasar Wadungasri Waru Sidoarjo, Selasa (12/11). Cabup yang berpasangan dengan cawabup Mimik Idayana itu ingin mendengar langsung aspirasi pedagang.

Dalam kegiatan tersebut, paslon nomor urut 1 itu berdialog langsung dengan pedagang dan membagikan kaos serta topi BAIK (Bandi-Mimik).

"Yo iki pak Bandi, Cabup kita, ayo konco iki tonggo dewe pilih no 1 Pak Bandi dan Bu Mimik," teriak Bu Hartini, pedagang ayam di Pasar Wadungasri sambil mengangkat tangannya

menunjukkan jari satu.

Subandi mengatakan, pihaknya berencana merevitalisasi pasar-pasar tradisional di Kota Delta. "Saya melihat langsung kondisi pasar tradisional sudah waktunya direvitalisasi karena kondisinya kurang layak dan stan tidak tertata dengan baik, nanti kita perbaiki sehingga nyaman buat berjualan dan berbelanja, nanti kita bikin pasar yang lebih modern kondisinya," ujarnya.

Tujuannya, menciptakan ruang usaha yang lebih layak untuk mendukung perekonomian masyarakat lokal. "Kami nanti akan perbaiki pasar tra-

disional ini agar lebih baik sehingga masyarakat lebih nyaman saat berbelanja," ujarnya.

Setelah dari Pasar Wadungasri, Cabup Subandi melanjutkan kunjungan ke pasar dadakan Perumahan Wisma Tropodo yang juga ramai pembeli terutama warga setempat.

Subandi mengapresiasi keberadaan pasar dadakan tersebut karena sangat membantu warga perumahan untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Cabup Subandi juga mampir di warung Pujasera RW 06 Wisma Tropodo untuk makan pagi bersama warga setempat. (sai/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

✓ Jelang Debat Ketiga KPU Sidoarjo Gelar Rapat Koordinasi

Sidoarjo, Pojok Kiri

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo menggelar rapat koordinasi persiapan debat ketiga di Warung Lesehan Ning Lis, Senin (11/11).

Rakor tersebut dihadiri KPU, Bawaslu, LO masing-masing paslon, kepolisian dan instansi terkait. Hasilnya, debat ketiga Pilbup Sidoarjo tetap dilaksanakan pada, Senin 18 November 2024. Lokasinya di Hotel Aston Sidoarjo.

"Untuk waktu dilaksanakan di malam hari atau siang hari masih akan dibahas lebih lanjut," kata Divisi SDM, Sosdiklih dan Partisipasi Masyarakat, KPU Sidoarjo, Mokhammad Yasin dilokasi.

Ketua KPU Sidoarjo, Fauzan Adhim, juga merespon terkait isu paslon nomor urut I yang meminta debat ketiga ditiadakan. Fauzan menegaskan, pada rakor

tanggal 10 November lalu, tidak ada LO (Liaison Officer) Paslon yang menolak debat ketiga.

"Dalam diskusi tersebut, tidak ada LO paslon yang menolak pelaksanaan debat ketiga," katanya.

LO Paslon 01 menyatakan, akan mengikuti keputusan KPU terkait debat ketiga, apakah akan dilanjutkan atau tidak. Akhirnya hari ini dilakukan rakor dan disepakati diadakan tanggal 18 November.

Namun, masing-masing paslon tidak diizinkan membawa massa pendukung atau relawan ke area lokasi debat. Yang diperbolehkan hanya memperoleh undangan saja.

Tim LO Paslon Subandi-Mimik Idayana (BAIK), Nanang Haromain mengatakan, bahwa siap mengikuti debat ketiga sesuai dengan kesepakatan dalam rapat koordinasi.

Dia menegaskan, Paslon



Subandi-Mimik tidak pernah mengusulkan atau meminta KPU Sidoarjo meniadakan debat ketiga. Apalagi, lanjut Nanang, Subandi-Mimik lebih unggul dan menguasai materi dalam dua kali debat.

"Calon kami (Subandi-Mimik, red) jelas-jelas lebih menguasai materi dan

program-programnya juga mudah diaplikasikan di masyarakat, tidak ada alasan kami takut untuk debat ketiga," ujarnya.

Sementara, LO Paslon SAE, Samsul Hadi mengatakan, pihaknya akan mengikuti hasil kesepakatan dalam rakor. Termasuk tidak akan

membawa relawan atau pendukung.

Politikus PKB itu memastikan, bahwa Achmad Amir Aslichin-Edy Widodo (SAE) siap untuk mengikuti debat ketiga.

"Kita tidak akan menyaksikan kemampuan dari calon kita," ujarnya. (Nang)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT